

EFEKTIFITAS PERAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TERHADAP PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO

Ayu Nur Fadilah¹, Hikmah Muhaimin², Tri Ratnarayuhani³

Universitas Islami Majapahit

ABSTRAK :Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas peran PKK terhadap pembangunan kesehatan masyarakat di Kelurahan Kauman, apa yang menjadi hambatan dan keberhasilan PKK terhadap pembangunan kesehatan masyarakat di Kelurahan Kauman. Dalam mendapatkan data-data tersebut, maka penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan landasan Teori Organisasi Stephen P.Robbins, hasil penelitian ini menjelaskan efektifitas peran PKK Kelurahan Kauman dalam melaksanakan program pembangunan kesehatan masyarakat masih kurang efektif. Terlihat dari beberapa indikator yang belum tercapai antara lain perencanaan dan efisiensi yang kurang tepat sehingga mengurangi keefektifan Peran PKK terhadap pembangunan kesehatan masyarakat. Kurangnya dukungan anggaran dana dan fasilitas dari pemerintah desa serta kurangnya transparansi terkait pendanaan juga menjadi penghambat dalam kegiatan pembangunan kesehatan masyarakat.

Kata Kunci : Efektifitas, Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK), Kesehatan Masyarakat

1 PENDAHULUAN

Secara umum Negara Indonesia didominasi oleh pedesaan, meskipun beberapa ciri pedesaan perlahan meredup bersamaan dengan proses industrialisasi dan globalisasi. Oleh karena itu, usaha membangun masyarakat desa untuk melawan kemiskinan dan untuk meningkatkan taraf hidup harus menjadi agenda penting dalam kegiatan pembangunan pada masa yang akan datang. Perencanaan dan implementasi pembangunan berisi usaha untuk memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi. Pembangunan masyarakat di suatu desa merupakan hal yang sangat penting untuk memperbaiki kualitas hidup penduduk desa serta memperkuat kemandirian. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) diatur dalam Pemendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan

Desa Bab I ketentuan umum Pasal 3 yang berbunyi "Pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam bagian kedua Pemendagri No. 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa diatur pembangunan SDM dalam poin pemberdayaan masyarakat yang mengatur tentang ; pertama usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan. Kedua pelatihan teknologi tepat guna. Ketiga pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Keempat, peningkatan kapasitas masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pemerintah telah membentuk berbagai program yang salah satunya adalah organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diseluruh wilayah Indonesia. PKK merupakan sebuah organisasi yang terbentuk sejak tahun 1972, organisasi yang telah diakui oleh masyarakat, pada tahun 2007 mendapat penghargaan dari beberapa lembaga karena melalui 10 program pokok PKK telah mampu melibatkan wanita dalam upaya mewujudkan keluarga

- Ayu Nur Fadilah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: ayu52838@gmail.com
- Hikmah Muhaimin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: hikmahmuhaimin@gmail.com
- Tri Ratnarayuhani Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: triratnarayuhani@unim.ac.id

yang sejahtera, maju dan mandiri. Selain itu, PKK diharapkan mampu membebaskan wanita dari belenggu budaya patriarki, sehingga memiliki kemandirian. Melalui PKK diharapkan harkat dan martabat wanita sebagai bagian dari keluarga dapat ditingkatkan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 segi pokok keluarga dengan membentuk Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para istri kepala dinas/jawatan dan istri kepala daerah sampai dengan tingkat desa dan kelurahan yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

PKK juga besinergi terhadap pembangunan masyarakat, PKK bisa menjadi pihak digarda terdepan dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi ditengah masyarakat. Misalnya, mensosialisasikan kepada remaja tentang rawan dan risiko pernikahan usia dini, menggerakkan ibu-ibu bagaimana caranya menekan angka kematian ibu hamil, juga berkontribusi dalam mengatasi masalah gizi anak kesehatan anak dan stunting, beberapa hal tersebut merupakan suatu tugas PKK dalam menjalankan perannya terhadap pembangunan masyarakat.

Pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah bersama rakyat dan bertujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada rakyat. Desa/kelurahan dan masyarakatnya mempunyai kedudukan dan potensi yang sangat penting, serta sifat umum masyarakat yang sederhana dalam perilaku yang perlu dibangun dan dibina usaha pembangunan negara. Seperti yang diketahui bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya, dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan pedomannya. Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial sesuai dengan tujuan dan cita-cita dari kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 alenia IV. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan-perubahan yang lebih baik yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi rakyat yang adil.

Dalam proses pembangunan dibutuhkan perencanaan yang matang dan memiliki alternatif yang memungkinkan untuk diaplikasikan dan menjadi aspirasi. Pembangunan menitikberatkan kepada keragaman kehidupan dengan berlandaskan hukum dan menjadi solusi untuk

permasalahan yang ada. Pembangunan juga diartikan proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan (growth) maupun perubahan (change) dalam kehidupan bersama, sosial, dan budaya. Pembangunan saat ini bukan hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur saja, tetapi sudah mencakup kepada pembangunan dalam kehidupan masyarakat.

Kelurahan Kauman terletak di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, merupakan kelurahan yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Secara pelaksanaan dalam pengimplementasian pembangunan desa/kelurahan sudah beberapa yang telah dijalankan. Namun pembangunan fisik dan nonfisik di Kelurahan Kauman masih belum seimbang. Yang mana pemerintah Kelurahan Kauman lebih memprioritaskan pembangunan fisik dibanding pembangunan non fisik. Pembangunan non fisik adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), dimana pembangunan SDM sangatlah penting. Mengingat manusia adalah pelaku dari pembangunan itu sendiri. Penelitian ini dititikberatkan di Kelurahan Kauman khususnya di Kauman Gang 6 dan 7, dimana di tempat tersebut masih banyak ditemui permasalahan sosial misalnya, maraknya fenomena pernikahan anak usia dini yang disebabkan kehamilan pra-nikah, kurangnya gizi/kesehatan buruk terhadap anak-anak dan balita, keluarga kurang mampu tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya disebabkan karena terlalu banyak anak, banyaknya pengangguran, dan juga pemukiman kumuh masih ditemui di Kelurahan Kauman gang 6 meskipun sudah adanya bantuan dari pemerintah desa setempat (program bedah rumah) namun pemukiman di tempat tersebut masih terlihat kurang layak disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat dan tidak dapat menjaga kebersihan lingkungan.

PKK disini tidak hanya sebuah organisasi yang hanya diperuntukkan sebagai tempat berkumpulnya ibu rumah tangga, namun juga untuk menjalankan tugas-tugas sebagai garda terdepan dalam menghadapi fenomena sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Kader PKK Kelurahan Kauman dalam mengimplementasikan tugasnya juga dibekali ilmu dari setiap pelatihan-pelatihan ataupun penyuluhan-penyuluhan yang telah di ikuti dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten untuk diterapkan dalam setiap menjalankan tugasnya. Salah satu program inti yang di laksanakan oleh Tim PKK adalah pembangunan kesehatan baik bagi keluarga maupun lingkungan masyarakat.

2. KAJIAN TEORI

Teori Organisasi (Stephen P. Robins)

Kriteria keefektifan organisasi

1. Tujuan Organisasi

Sebuah organisasi, berdasarkan definisi diciptakan untuk mencapai satu tujuan atau lebih yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, tidak heran jika kita menjumpai bahwa pencapaian tujuan merupakan kriteria yang paling banyak digunakan untuk menentukan keefektifan.

Pendekatan pencapaian tujuan (goal attainment approach) menyatakan bahwa keefektifan menyatakan bahwa keefektifan sebuah organisasi harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan (ends) ketimbang caranya (means). Yang perlu dibutuhkan adalah bottom line-nya. Yang termasuk kriteria pencapaian tujuan yang populer adalah memaksimalkan laba, memenangkan pertandingan, membuat pasien menjadi sembuh kembali, dan sebagainya. Kesamaannya adalah bahwa mereka memperhatikan tujuan (ends) karena organisasi diciptakan untuk mencapai hal itu.

Pendekatan pencapaian tujuan mungkin paling nyata terlihat pada Manajemen By Objectives (MBO). MBO adalah falsafah manajemen yang menilai keefektifan organisasi serta para anggotanya dengan cara melihat seberapa jauh mereka mencapai tujuan-tujuan khusus yang telah ditetapkan bersama oleh pimpinan dan para bawahannya. Tujuan-tujuan yang nyata, yang dapat dibuktikan, dan yang dapat diukur dikembangkan dalam MBO.

2. Perencanaan

Perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubungkan-hubungkan fakta, serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa datang, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki.

- Perencanaan top down

Adalah proses perencanaan yang dirancang oleh lembaga/departemen/daerah menyusun rencana pembangunan sesuai dengan wewenang dan fungsinya.

- Perencanaan bottom up

Adalah planning approach starting at the lowest hierarchical level and working upward (pendekatan perencanaan yang dimulai dari tingkatan hirarkis paling rendah menuju ke atas).

Selain itu, menurut penjelasan UU 25 Tahun 2004, pendekatan atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

3. Partisipasi

Keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi merupakan pengertian dari partisipasi.

Pendekatan sistem terhadap efektifitas organisasi terdiri dari sub-sub bagian yang saling berhubungan. Jika salah satu sub dalam bagian ini mempunyai performa yang buruk, maka akan timbul dampak negatif terhadap performa keseluruhan sistem. Keefektifan membutuhkan kesadaran dan interaksi yang berhasil dengan konstitusi lingkungan. Manajemen tidak boleh gagal dalam mempertahankan hubungan yang baik dengan para pelanggan, pemasok, lembaga pemerintahan, serikat buruh, dan konstitusi sejenis yang mempunyai kekuatan untuk mengacaukan operasi organisasi yang stabil.

Pentingnya partisipasi adalah sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.

4. Efisiensi

Efisiensi suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/ sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan

efisien jika ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah.

3. METODE PENELITIAN

Berkaitan dengan judul yang dikemukakan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berupa kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif dan menggunakan metode yang berbeda dilihat dari pengumpulan informasi, seperti individu yang menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus.

4. PEMBAHASAN

1. Tujuan (Goal)

a. Berdasarkan analisis indikator Pendekatan pencapaian tujuan (goal attainment approach) Robbins menyatakan bahwa keefektifan sebuah organisasi harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan (ends) ketimbang caranya (means). Tugas Pokja 4 Terkait pembangunan kesehatan masyarakat sesuai program PKK "kesehatan" yaitu :

1. Meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan millenium antara lain :

- a. Menghapus tingkat kelaparan (menurunkan prevalensi anak balita kurang gizi)
- b. Menurunkan angka kematian anak
- c. Meningkatkan kesehatan ibu hamil
- d. Memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.

2. Memonitor pelaksanaan Sistem Informasi Posyandu (SIP) antara lain:

- a. Mengembangkan dan membina pelaksanaan kegiatan POSYANDU
- b. Melaksanakan pencatatan ibu hamil, melahirkan, nifas, ibu meninggal, kelahiran dan kematian bayi dan balita.

3. Meningkatkan budaya Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)

Sistem Informasi Posyandu (SIP) adalah tatanan dari berbagai komponen kegiatan Posyandu yang menghasilkan data dan informasi tentang pelayanan terhadap proses tumbuh kembang anak dan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak yang meliputi cakupan program, pencapaian program, kontinuitas penimbangan, hasil penimbangan dan partisipasi masyarakat.

Manfaat SIP antara lain :

1. Sebagai dasar acuan bagi Kader Posyandu untuk memahami permasalahan sehingga dapat mengembangkan kegiatan yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran.

2. Sebagai informasi yang tepat guna dan tepat waktu mengenai pengelolaan Posyandu, agar berbagai pihak yang berperan dalam pengelolaan Posyandu dapat menggunakannya untuk membina Posyandu demi kepentingan masyarakat.

Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik, perlu diperhatikan prinsip organisasi agar mencakup tujuan yang jelas. Prinsip yang diterapkan terkait pembangunan kesehatan masyarakat sesuai dengan visi dan misi PKK yaitu prinsip pembagian tugas, dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan, supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan optimal maka dilakukan pembagian tugas/pekerjaan berdasarkan kemampuan SDMnya (sesuai bidang). Terkait program pembangunan kesehatan yang dijalankan oleh bidan desa dengan kader PKK "Pokja 4", juga bekerjasama dengan puskesmas. Dalam pembangunan kesehatan dijalankan oleh TP PKK / kader posyandu balita dan lansia.

Prinsip dapat diartikan sebagai cara berpikir atau pedoman dalam menjalankan sesuatu termasuk menjalankan kegiatan dalam suatu organisasi, hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan. TP PKK Kelurahan Kauman disini, menjelaskan bahwa prinsip yang digunakan oleh organisasi ini adalah prinsip pembagian tugas, untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan, dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian tugas/kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Pembagian tugas/kerja tersebut juga didasari dari kemampuan masing-masing anggota. Misalnya, dalam Pokja 4 terkait Kesehatan yang dipimpin oleh Bidan desa juga dengan anggota Pokja 4 yang mendominasi dalam bidang kesehatan, mereka juga dibekali ilmu juga seringkali mengikuti pelatihan atau seminar terkait bidang kesehatan

termasuk tentang kesehatan ibu dan balita. Se jauh ini terjalin kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Tim Penggerak PKK bidang kesehatan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Meskipun tidak berlatar belakang tenaga kesehatan namun mereka aktif mengikuti seminar atau pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sehingga membentuk anggota yang memiliki keahlian, aktif dan tanggap dalam menjalankan tugasnya. Namun, menurut asumsi masyarakat mengatakan bahwa bidan desa yang sekaligus menjabat sebagai ketua pokja 4 PKK bidang kesehatan tidak siap menangani keadaan darurat, hal tersebut tentu akan menjadi hambatan untuk pencapaian sebuah tujuan organisasi seperti yang telah dijelaskan pada indikator Pendekatan pencapaian tujuan (goal attainment approach) yang menyatakan bahwa keefektifan sebuah organisasi harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan (ends) ketimbang caranya (means). Yang perlu dibutuhkan adalah bottom line-nya. Juga termasuk kriteria pencapaian tujuan adalah membuat pasien menjadi sembuh kembali, dan sebagainya. Kesamaannya adalah bahwa mereka memperhatikan tujuan (ends) karena organisasi diciptakan untuk mencapai hal itu.

2. Perencanaan (Planning)

a. Berdasarkan analisis indikator perencanaan Robbins menyatakan bahwa perencanaan diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Rencana terkait program pembangunan kesehatan masyarakat sampai saat ini hanya menjalankan kegiatan rutin yaitu posyandu balita yang dijalankan setiap hari rabu minggu kedua dan posyandu lansia setiap hari selasa minggu pertama. Belum ada perubahan apapun untuk kedepannya hanya sebagai monitoring dan meningkatkan agar lebih baik untuk mengoptimalkan pelayanan demi kesehatan masyarakat. Dalam arti, perencanaan untuk mengembangkan kegiatan masih kurang, se jauh ini hanya menjalankan kegiatan rutin. Dalam hal ini juga dibutuhkan evaluasi guna untuk mengetahui dimana baik dan kurangnya organisasi dalam mencapai tujuan. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu pembinaan kepada para anggota kader mengenai pemeriksaan bak mandin guna mencegah perkembangan jentik nyamuk yang berpotensi sebagai penyakit. Tujuan dapat tercapai apabila dalam perencanaannya terorganisir secara tepat. PKK dalam melaksanakan kegiatan lapangan mengacu pada

program kerja yang ada. Program kerja PKK tersebut meliputi :

a. Program kerja jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun, program kerja ini dibuat berdasarkan kondisi dan situasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kelurahan Kauman sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

b. Program kerja jangka pendek (tahunan). Program kerja tahunan jangka pendek mengacu pada program kerja jangka menengah dengan memprioritaskan program-program tertentu yang perlu mendapatkan penanganan terlebih dahulu. Adapun program jangka pendek satu tahun adalah program tahunan tentang pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK yang terkoordinasi dalam kelompok kerja.

Tim Penggerak PKK dibawah naungan Pemerintahan Kelurahan Kauman, dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan visi misi dan tujuannya di bidang kesehatan terdapat hambatan antara lain kurangnya fasilitas dan dana anggaran untuk kesehatan.

Pemerintah Kelurahan Kauman se jauh ini kurang memperhatikan terkait pembangunan kesehatan, yang selama ini digalakkan hanya pembangunan fisik, padahal terlihat secara nyata kesehatan sangat berdampak terhadap kehidupan. Dukungan yang diberikan dari pihak Kelurahan sendiri tidak cukup untuk menjalankan kegiatan-kegiatan, juga kurangnya fasilitas dan anggaran untuk biaya kesehatan. Namun untuk saat ini di fase pandemic covid pemerintah kelurahan kauman menyalurkan bantuan berupa bak cuci tangan, sabun, dan handsanitizer. Barang-barang pengadaan tersebut didapat langsung dari Pemerintah daerah untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat.

b. Kendala atau masalah sosial yang dihadapi PKK terkait pembangunan kesehatan masyarakat se jauh ini belum pernah ditemukan masalah yang dominan, hanya saja masalah datang dari luar bukan dari dalam, misal : kurangnya kesadaran warga akan pentingnya kesehatan sehingga terdapat warga yang anak balitanya terkena kekurangan gizi, maka TP PKK bersama bidan desa harus segera bertindak dalam penanganan gizi buruk tersebut. Dari sini tugas dan fungsi TP PKK sebagai monitoring atau garda paling depan pemerintah yang mengetahui langsung bagaimana keadaan dilapangan. Suatu masalah itu pasti ditemukan entah masalah dari luar atau dalam sekalipun masalah dari dalam seringnya terjadi berpedaan pendapat antar anggota, sebagai ketua PKK tidak membatasi apapun itu masukan dari para anggota, karena disini menerapkan

kontrol dari bawah, ibu-ibu anggota pasti mengetahui hal apa saja yang terjadi dilapangan, selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi.

3.Partisipasi (Participation)

a.Seluruh anggota TP PKK turut serta dan berpartisipasi aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terkait program pembangunan kesehatan masyarakat yang di jalankan oleh anggota Pokja 4 yang diketuai oleh bidan desa, menjalankan kegiatan rutin bulanan posyandu aktif bagi balita dan lansia. PKK bukan hanya sebatas organisasi, namun PKK merupakan lembaga yang memiliki tugas monitoring aktif masyarakat juga pengabdian, menerapkan keluarga sehat dan turut serta dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

b.Warga kelurahan kauman terkait pembangunan kesehatan juga turut aktif dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan posyandu baik balita maupun lansia. Berhubungan dengan kesehatan, semua elemen masyarakat pasti menginginkan kehidupan yang sehat jasmani maupun rohani. Bagi masyarakat adanya posyandu itu sangatlah penting, karena disetiap bulan kegiatan posyandu, warga bisa mengetahui kondisi kesehatan baik bagi balita maupun lansia, bekerjasama dengan puskesmas, suplai vitamin dan obat-obatan juga selalu terpenuhi. Namun untuk saat ini menghadapi pandemic covid dan melakukan protokol kesehatan, maka sementara kegiatan posyandu dan sebagainya diliburkan. Berdasarkan pengakuan salah satu warga tersebut kegiatan tetap diadakan namun secara individu dan tidak terjadwal.

4.Efisiensi (Eficient)

a.Pencapaian terkait program pembangunan kesehatan masyarakat hingga saat ini tergolong stabil dan naik secara perlahan, didukung teknologi yang semakin modern, juga dengan SDM yang tidak lelah untuk terus memperbaiki kualitas dengan terus belajar dari adanya pelatihan-pelatihan. Program kesehatan masyarakat yang dijalankan oleh bidan desa dengan mitra TP PKK juga bekerjasama dengan puskesmas.

b. Berbagai upaya dilakukan TP PKK agar tetap mampu menjalankan fungsinya secara optimal, PKK merupakan organisasi yang beranggotakan orang-orang yang memiliki jiwa sosial tinggi. Program-program PKK memang diciptakan untuk membentuk kehidupan keluarga yang lebih baik, juga ditujukan sebagai pengabdian kepada masyarakat demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dipahami dengan benar agar tercapainya tujuan organisasi dengan baik sesuai visi dan misi organisasi. Perubahan-perubahan

dalam organisasi sangat diperlukan untuk mengevaluasi kinerja masing-masing, sehingga perubahan bisa menjadi tola ukur dalam perubahan organisasi itu sendiri. Contoh : Lomba antar desa/wilayah, menang atau pun kalah bisa dijadikan bahan perbandingan untuk perubahan yang lebih baik.

Namun untuk hasil dari penelitian indikator efisiensi pada PKK Kelurahan Kauman yang berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Kas PKK yang digunakan untuk mengukur efisiensi dengan jumlah/biaya tidak ada disini tidak bisa ditemukan karena kami tidak dapat informasi data dari narasumber.

E. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan pembahasan dari ke empat indikator tersebut :

Suatu organisasi di buat guna untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. TP PKK Kelurahan Kauman memiliki beberapa tujuan terkait program kesehatan masyarakat yang tersusun dengan baik. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan perencanaan yang harus terorganisir, tanpa perencanaan yang jelas maka tujuan dalam organisasi akan sulit untuk dicapai atau bahkan tidak bisa mengembangkan kegiatan yang seharusnya dijalankan.

Indikator perencanaan TP PKK Kelurahan Kauman dirasa masih kurang optimal karena hanya memperhatikan peningkatan program pokok dan belum bisa mengembangkan karena masih terkendala dalam hal pendanaan.

Partisipasi juga merupakan indikator yang sangat penting dalam berjalannya suatu organisasi, anggota TP PKK Kelurahan Kauman turut serta dan aktif dalam setiap kegiatan juga berjiwa sosial tinggi, begitu pun dengan masyarakat yang sudah menyadari atau mawas diri bahwa kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan. Selanjutnya, indikator efisiensi guna untuk mengukur ke efektifan organisasi terkait biaya/pendanaan TP PKK Kelurahan Kauman kurang transparan, semua dana tidak ada sehingga menghambat berjalannya kegiatan dan tidak bisa mengembangkan program.

Selain ke empat indikator tersebut dapat disimpulkan pula faktor pendorong dan penghambat efektifitas peran PKK terhadap pembangunan kesehatan masyarakat. Faktor pendorong yang berkenaan dengan partisipasi anggota yang aktif dalam pelaksanaan pogram PKK yaitu pertama adanya suatu kemauan atau keinginan dari diri sendiri yang sejalan dengan kebutuhan, artinya disini anggota PKK menyadari bahwa elemen kesehatan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kemudian untuk faktor

penghambat efektifitas peran PKK terhadap pembangunan kesehatan masyarakat ialah kurangnya dukungan dan fasilitas dari pemerintah desa yang berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan kegiatan program PKK.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terhadap pembangunan kesehatan masyarakat sudah memperlihatkan banyak pencapaian, namun masih kurang efektif terlihat dari beberapa indikator yang tidak memumpuni seperti halnya perencanaan, indikator perencanaan juga merupakan indikator yang dibutuhkan karena untuk mencapai tujuan langkah pertama yang akan dilakukan adalah perencanaan. Selanjutnya, untuk indikator efisiensi, dalam pencapaian programnya bisa dikatakan baik namun kurangnya transparansi terkait pendanaan juga menjadi penghambat berjalannya suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dalam organisasi.

DAFTAR PUSRTAKA

- [1] Adisasmita, Raharjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu; Yogyakarta
- [2] Afifudin, B.A.S. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [3] Agusta, I. 2002. Metode Evaluasi Program Pemberdayaan. Humaniora Utama Press; Bandung
- [4] Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- [5] Aslichati, L. (2011). Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan. Jurnal Organisasi dan Manajemen UT, 7 (1), hlm. 1-7.
- [6] Djauhari, Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia, Studi Tentang Kebijakan Regulasi dan Insititusalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial, Cetakan Kesatu, Unissula Perss, Semarang.
- [7] Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- [8] Handyaningrat, Soewarno, Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional. Gunung Agung, Jakarta. 1996
- [9] Hubies, Aida Vitayala, S. 2010. Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. IPB Press; Bogor
- [10] Iis, Pengembangan Sumber Daya Manusia Strategis Dalam Organisasi Pendidikan Luar Sekolah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Jakarta 2013
- [11] Ilmu Pemerintahan (Kybernology), Rineka Cipta, Jakarta: 2010
- [12] Inu Kencana Syafii, Sistem Pemerintahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta: 2002
- [13] Jaweng, Robert Endi, RUU Tentang Desa: Kritik atas Proposal Minimalisasi Versi Pemerintah, Jurnal Ilmu Pemerintahan, MIPI, Edisi 38, Jakarta: 2012
- [14] Moleong. J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakaria, Bandung: 1993
- [15] Munandar, S. C. U. (1985). Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- [16] Naili, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Bumi Aksara. Jakarta: 2001
- [17] Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Sosial, Yogyakarta, Gajah Mada Univercity Perss, 1993
- [18] Robert K. Yin. 2011. Studi Kasus (desain dan metode), Bandung
- [19] Roesmidi & Riza Risyanti, Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Alqaprint Jatiangor, 2008.
- [20] Suharto, E. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, PT. Refika Aditama; Bandung
- [21] Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Bandung: 2009
- [22] Suriadi, Agus. 2005. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat
- [23] Usman, Sunyoto. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 1998.